



RENJA

2025

RENCANA KERJA

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DKUKMPP



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan dapat menyelesaikan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari penyelesaian Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2021 – 2026.

Semoga dengan telah tersusunnya RENJA OPD ini, pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, baik dari aspek pengukuran kinerja kegiatan maupun dari aspek keuangan, sehingga dampak yang diharapkan adalah terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada segenap pejabat dan staf dilingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan yang telah memberikan motivasi, sehingga penyusunan perencanaan kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kami memohon dengan harapan agar rencana yang telah dituangkan dapat diwujudkan dalam implementasinya.

Nunukan, April 2024

Kepala Dinas

Sabri, ST., M.Si

**Pembina Utama Muda IV/ C
NIP.19720109 200212 1 005**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASILEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD	49
3.2 Program dan Kegiatan	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	61
BAB V PENUTUP	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang di laksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan lingkungan mengharuskan setiap lembaga Pemerintah untuk melakukan berbagai penyesuaian terutama yang mengarah kepada terselenggaranya tata pemerintahan yang baik serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih efisien, efektif, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.



2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
3. Substansi Renja Perangkat Daerah memuat evaluasi status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan OPD terhadap Renstra OPD; evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu; rumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, dana indikatif serta sumber dananya dan prakiraan maju.
4. Penyusunan program dan kegiatan OPD untuk tahun yang direncanakan mengacu pada ketentuan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan mempertimbangkan capaian kinerja SPM yang ada (jika SPM untuk kegiatan dimaksud tersedia).
5. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD.
6. Program/kegiatan dalam RKPD Provinsi dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan untuk didanai APBD Provinsi, APBN dan sumber lainnya, sedangkan untuk RKPD Kabupaten/Kota dirinci menurut sumber dana APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lainnya.

Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per



keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja OPD yang mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi



Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan sasaran, dan strategi didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah, aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan dan digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3962);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara



Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.



Tujuan menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 1 tahun dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dilaksanakan tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.2 Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

Dalam rangka melaksanakan kegiatan serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan pada tahun 2023 melaksanakan 15 (Lima Belas) Program, 23 (Dua Puluh Tiga) Kegiatan dan 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA**

**1. Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah

- Pengawas Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota

III. PROGRAM PENIDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI

1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota



- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota

V. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)

1. Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

- Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

VI. Program Pengembangan UMKM

1. Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil



- Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM Serta Desain dan teknologi

VII. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota

- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota



**IX. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
INDUSTRI NASIONAL**

**1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota**

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional

**X. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN
PERUSAHAAN**

**1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat
Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

**2. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah
Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai
Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

**XI. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN**

**1. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya**

- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan



**XII. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING**

**1. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/
Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di
Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
Rakyat

**2. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar
Kabupaten/Kota**

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha
distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota
- Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar
Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

**3. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi



XIII. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang
- Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal

XIV. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
- Pameran Dagang Nasional
- Pameran Dagang Lokal
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

XV. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

REALISASI ANGGARAN

Alokasi Anggaran Belanja yang tersedia pada Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan



Kabupaten Nunukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp.8.070.041.820,00**, Dengan Realisasi Belanja sebesar **Rp.7.066.807.403,00 (87,57%)** . Realisasi Belanja menurut jenis belanja dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023

 PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH sampai dengan 31 Desember 2023				
Urusan Pemerintahan : 2.17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH SKPD : 2.17.3-31.3-30.01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Unit Organisasi : 2.17.3-31.3-30.01.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)
5	BELANJA DAERAH	8.070.041.820,00	7.066.807.403,00	87,57
5.1	BELANJA OPERASI	7.757.534.980,00	6.785.517.251,00	87,47
5.1.01	Belanja Pegawai	3.702.381.183,00	3.532.211.483,00	95,40
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.780.350.677,00	2.302.333.411,00	82,81
5.1.04	Belanja Subsidi	1.184.803.100,00	860.972.357,00	72,67
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	312.506.840,00	281.290.152,00	90,01
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	312.506.840,00	281.290.152,00	90,01

Belanja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan TA 2023 sebagai berikut:

- Belanja Pegawai sebesar Rp.3.702.381.183,00 yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan PNS serta belanja tambahan penghasilan PNS dengan Realisasi Rp. 3.532.211.483,00 atau sebesar 95,40%;
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.2.780.350.677,00 dengan Realisasi Rp.2.302.333.411,00 atau sebesar 82,81%;
- Belanja Subsidi sebesar Rp.1.184.803.100,00 dengan Realisasi Rp. 860.972.357,00 atau sebesar 72,67%;



d. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.90.000.000,00 dengan Realisasi Rp. 90.000.000,00 atau sebesar 100.00%

e. Belanja Modal sebesar Rp.312.506.860,00 dengan Realisasi Rp.281.290.152,00 atau sebesar 90,01%.

Berikut disajikan realisasi keuangan untuk program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Perdagangan TA 2023.

Tabel. 2.2

**Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2023**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	KEUANGAN (%)	(Rp.)
1	2		3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,708,072,875.00	4,376,192,387.00	92.95	331,880,488.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		70,867,510.00	50,036,900.00	70.61	20,830,610.00
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,504,500.00	10,125,000.00	96.39	379,500.00
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60,363,010.00	39,911,900.00	66.12	20,451,110.00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3,702,381,183.00	3,532,211,483.00	95.40	170,169,700.00
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,702,381,183.00	3,532,211,483.00	95.40	170,169,700.00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		289,535,400.00	228,952,480.00	79.08	60,582,920.00
	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	91,696,860.00	80,240,152.00	87.51	11,456,708.00
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,092,790.00	35,400,870.00	90.56	3,691,920.00
	3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	17,882,150.00	14,508,000.00	81.13	3,374,150.00
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140,863,600.00	98,803,458.00	70.14	42,060,142.00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		530,707,872.00	475,347,178.00	89.57	55,360,694.00
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,100,000.00	600,000.00	54.55	500,000.00
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37,800,000.00	27,501,898.00	72.76	10,298,102.00
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491,807,872.00	447,245,280.00	90.94	44,562,592.00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		114,580,910.00	89,644,346.00	78.24	24,936,564.00
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	91,080,910.00	66,188,196.00	72.67	24,892,714.00
	2	Pemeliharaan Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	18,500,000.00	18,500,000.00	100.00	-



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

	3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	5,000,000.00	4,956,150.00	99.12	43,850.00
II	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		66,633,315.00	66,606,000.00	99.96	27,315.00
6	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjaman Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		66,633,315.00	66,606,000.00	99.96	27,315.00
	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	66,633,315.00	66,606,000.00	99.96	27,315.00
III	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		98,352,905.00	60,193,000.00	61.20	38,159,905.00
7	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota		98,352,905.00	60,193,000.00	61.20	38,159,905.00
	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	98,352,905.00	60,193,000.00	61.20	38,159,905.00
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		-	-	0.00	-
8	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	0.00	-
	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	-	-	0.00	-
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		179,091,060.00	165,151,974.00	92.22	13,929,086.00
9	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		179,091,060.00	165,151,974.00	92.22	13,929,086.00
	1	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	70,551,060.00	56,621,974.00	80.26	13,929,086.00
	2	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan Usha Mikro	-	-	-	-
	3	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	108,540,000.00	108,530,000.00	99.99	10,000.00
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		116,539,290.00	66,946,300.00	57.45	49,592,990.00
10	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		116,539,290.00	66,946,300.00	57.45	49,592,990.00
	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM Serta Desain dan teknologi	116,539,290.00	66,946,300.00	57.45	49,592,990.00
VII	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		57,062,650.00	40,239,000.00	45.12	15,080,000.00



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

11	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		27,480,000.00	12,400,000.00	45.12	15,080,000.00
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	27,480,000.00	12,400,000.00	45.12	15,080,000.00
12	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		29,582,650.00	27,839,000.00	94.11	1,743,650.00
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	29,582,650.00	27,839,000.00	94.11	1,743,650.00
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		375,154,375.00	303,449,000.00	93.32	21,705,375.00
13	Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		50,000,000.00	-		
	1	Penyediaan sarana Distribusi Perdagangan	50,000,000.00	-		
14	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		325,154,375.00	303,449,000.00	93.32	21,705,375.00
	1	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	325,154,375.00	303,449,000.00	93.32	21,705,375.00
IX	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		1,423,599,700.00	1,069,202,357.00	72.61	334,374,743.00
15	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		1,220,722,100.00	886,347,357.00	72.61	334,374,743.00
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Akseibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	29,979,000.00	25,375,000.00	72.61	4,604,000.00
	2	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1,190,743,100.00	860,972,357.00	72.31	329,770,743.00
16	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		187,957,800.00	171,396,000.00	72.31	329,770,743.00
	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	67,639,200.00	51,921,000.00	76.76	15,718,200.00
	2	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	120,318,600.00	119,475,000.00	76.76	15,718,200.00
17	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		14,919,800.00	11,459,000.00	76.80	3,460,800.00
	1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14,919,800.00	11,459,000.00	76.80	3,460,800.00
X	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		63,736,200.00	56,155,636.00	88.11	7,580,564.00
18	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		63,736,200.00	56,155,636.00	88.11	7,580,564.00



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	19,812,000.00	18,580,541.00	88.11	7,580,564.00
	3	Pameran Dagang Nasional	19,907,600.00	18,695,489.00	93.91	1,212,111.00
	4	Pameran Dagang Lokal	14,726,600.00	10,739,606.00	93.91	1,212,111.00
	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	9,290,000.00	8,140,000.00	87.62	1,150,000.00
XI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		420,087,730.00	368,809,660.00	87.79	51,278,070.00
19	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		420,087,730.00	368,809,660.00	87.79	51,278,070.00
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	354,336,730.00	305,411,260.00	86.19	51,278,070.00
	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	65,751,000.00	63,398,400.00	96.42	2,352,600.00
XII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		71,988,500.00	42,974,889.00	59.70	29,013,611.00
20	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		71,988,500.00	42,974,889.00	59.70	29,013,611.00
	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	35,997,600.00	21,155,000.00	59.70	29,013,611.00
	3	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	35,990,900.00	21,819,889.00	60.63	14,171,011.00
XIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		439,317,200.00	401,447,200.00	91.38	37,870,000.00
21	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota		439,317,200.00	401,447,200.00	91.38	37,870,000.00
	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	31,596,000.00	10,737,600.00	91.38	20,858,400.00
	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	330,514,200.00	319,655,600.00	96.71	10,858,600.00
	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	77,207,000.00	71,054,000.00	96.71	6,153,000.00
XIV	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		35,500,000.00	35,500,000.00	100.00	-
22	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		35,500,000.00	35,500,000.00	100.00	-
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	17,680,000.00	17,680,000.00	100.00	-
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	17,820,000.00	17,820,000.00	100.00	-
XV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		14,906,020.00	13,940,000.00	93.52	966,020.00



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

23	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		14,906,020.00	13,940,000.00	93.52	966,020.00
	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	14,906,020.00	13,940,000.00	93.52	966,020.00
JUMLAH TOTAL			8,070,041,820.00	7,066,807,403.00	87.57	1,003,234,417.00



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

**Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan
Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan s/d Tahun 2023 Kabupaten Nunukan Tabel 2.3**

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUPUT)	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD PADA TAHUN AKHIR		TARGET DAN REALISASI RENJA 2023		
				Target	Rp	TARGET 2023	REALISASI 2023	TINGKAT REALISASI
1		2	3	4		5	6	7
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Unit Kerja Internal Yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	29,774,456,674.03	100	75	75
1	Perencanaan , Penganggran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Dokumen	41	222,882,472.00	100	100	100
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	91,861,472.00	2	2	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	30	131,021,000.00	6	6	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	Unit Kerja	6	25,602,939,162.03	6	6	100
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	70	25,602,939,162.03	28	28	100



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	Unit Kerja	6	728,237,550.00	6	6	100
	1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	10	79,187,600.00	2	2	100
	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	15	176,153,200.00	3	5	167
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	10	79,858,950.00	2	2	100
	4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	393,037,800.00	10	15	150
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan penyediaan Jasa Penunjang	Unit Kerja	6	2,884,584,740.00	6	6	100
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20	7,300,000.00	4	4	100
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	60	174,362,500.00	12	12	100
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	60	2,702,922,240.00	12	12	100
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD	Unit Kerja	6	335,812,750.00	6	6	100



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	26	264,585,000.00	26	13	50
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	15	43,977,750.00	15	15	100
	3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	1	27,250,000.00	1	1	100
II.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM Pengelola Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	14.78	136,200,815.54	11.41	19.95	175
1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota		Jumlah koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Perkoperasian	Koperasi	35	136,200,815.54	20	21	105
	1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasi	Orang	145	136,200,815.54	30	88	293



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

III.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang di Lakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Persen	24.81	218,690,728.45	6.2	13.61	220
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi	30	218,690,728.45	15	60	400
	1. Pengawasas Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	215	218,690,728.45	30	60	200
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Volume Usahanya	Persen	14.89	117,681,524.48	11.17	1.13	10
1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi	60	117,681,524.48	45	11	24



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif Bernilai Tambah Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Unit Usaha	105	117,681,524.48	25	11	44
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	14.98	883,319,810.97	10.09	19.44	193
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		Jumlah Usaha Mikro Yang Diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	UMK	90	883,319,810.97	60	70	117
	1.	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	90	383,319,810.97	60	60	100
	2.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	60	500,000,000.00	45	45	100
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Ratio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	6.14	618,531,154.81	5.08	72.84	1434



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

1.	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pelaku Usaha Kecil	15	618,531,154.81	3	579	19300
	1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM Serta Desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	870	618,531,154.81	50	50	100
VII.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Peningkatan Jumlah Sentra IKM	Persen	4.52	637,559,462.90	3.48	3.48	100
1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	2	637,559,462.90	1	1	100
	1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	2	280,000,000.00	1	1	100
	2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	40	184,000,000.00	8	123	1538
	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	90	173,559,462.90	16	16	100



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	191,109,475.45	100	100	100
1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaku IKM	47	191,109,475.45	8	37	463
1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang usaha dengan risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	30	95,843,850.45	5	22	440



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	30	95,265,625.00	5	15	300
IX.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan	Persen	2.53	75,000,000.00	2.13	2.13	100
	1.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Informasi Lengkap dan Terkini	Dokumen	5	75,000,000.00	1	1	100
	1.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	5	75,000,000.00	1	1	100
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Layak / Sehat	Persen	23.26	1,842,975,000.00	20.93	20.93	100
	1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	Unit	3	-	0	0	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	0	-	0	0	
2.		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Orang	27	1,692,975,000.00	27	27	100
	1.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	45	1,692,975,000.00	9	9	100
XI		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	Persen	2.04	6,780,365,500.00	2.55	1.05	41
1.		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Diawasi	Jenis Barang	25	6,074,885,000.00	20	20	100
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	40	150,000,000.00	8	8	100
	2.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	40	5,924,885,000.00	8	8	100
2.		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian harga dan Stok barang kebutuhan pokok yang dilaksanakan	Kegiatan	75	639,480,500.00	15	15	100



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	50	326,250,000.00	10	10	100
	2.	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Laporan	25	313,230,500.00	5	5	100
3.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk Bersubsidi yang disalurkan yang diawasi	Ton	11800	66,000,000.00	2800	2,187	78
	1.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan pengawasan Penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	12	66,000,000.00	3	2	67
XII		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkat Penjualannya	Persen	50.00	364,000,000.00	50	50	100
1.		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi / pemasaran	15	364,000,000.00	3	1	33
	1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	5	182,000,000.00	1	2	200
	2.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kementrian Dengan Retail, <i>Marketplace</i> , Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	10	182,000,000.00	2	2	100



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

XIII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Persen	59.67	742,017,400.00	50.72	104	205
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan	Persen	59.67	742,017,400.00	50.72	104	205
	1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur , Alat Takar , Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	2250	480,017,400.00	425	606	143
	2.	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina	Orang	60	262,000,000.00	10	15	150
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	441,596,415,412.06	297,850,778.00	435,038,160,758.85	74,527,649,569.00	17
1.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti	Jumlah Pameran/ misi dagang	11	297,850,778.00	2	2	100
	1.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Yang Dibina	Pelaku Usaha	25	106,000,000.00	5	3	60
	2.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang	Pelaku Usaha	4	86,000,000.00	1	2	200
	3.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	4	65,000,000.00	1	2	200
	4.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Yang Dibina	Pelaku Usaha	50	40,850,778.00	10	5	50
XV	ROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Fasilitas (Non) Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Persen	100	282,300,000.00	100	100	100



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Yang Diterbitkan	Dokumen	10	137,300,000.00	2	2	100
	1. Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	10	137,300,000.00	2	2	100
2.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah SKA Yang Diterbitkan	Dokumen	500	145,000,000.00	100	110	110
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	500	145,000,000.00	100	110	110



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Adapun Indikator, SPM, IKK yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan dapat di lihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

***Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nunukan Tabel 2.4***

INDIKATOR		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					REALISASI	CAPAIAN
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023
INDIKATOR TUJUAN								
1.	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	40.00	42.86	50.00	53.33	56.52	27.27	63.631
2.	Persentase Pertumbuhan UMK	1.80	2.36	2.88	3.36	3.80	19.62	831.21
3.	Persentase Pertumbuhan IKM	1.55	2.28	2.98	3.61	4.19	12.05	528.43
4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5.95	7.44	7.05	7.13	5.91	7.20	96.77
INDIKATOR SASARAN								
1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	9.93	11.17	12.41	13.65	14.89	6.35	56.84
2.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru UMK	29.50	34.17	42.44	44.10	45.49	172.87	505.91
3.	Persentase Wirausaha Baru IKM	16.74	17.47	18.37	19.42	20.61	10.75	61.55
4.	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	790.70	1581.40
5.	Standar Deviasi Harga	7.22	6.67	6.44	6.11	5.56	5.74	116.20



2.3 ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ADALAH SEBAGAI :

1. Kurangnya Tenaga Administrasi (SDM) DKUKMPP
2. Kurangnya Tenaga Teknis yang Berkompeten (SDM)
3. Kurangnya Peralatan Kemetrolgian
4. Daya Saing Produk Dalam Negeri yang Masih Rendah
5. Adanya Ancaman bayang-bayang Inflasi Terkait Dengan Terbitnya PP 34/2018 Tentang Perdagangan Perbatasan
6. Ada Beberapa Kegiatan yang Tidak Terlaksana atau Tidak Terlaksana Secara Optimal Karena SPD Tidak Diterbitkan
7. Adanya Temuan dan Rekomendasi BPK agar Retribusi Pasar Dapat Ditarik
8. Belum Semua Kecamatan Memiliki Pasar Rakyat yang Representatif
9. Manajemen Pasar Belum Berjalan Sesuai Prinsip Organisasi yang Baik
10. Anggaran Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Maupun ATK Kantor Jauh dari Memadai
11. Letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain menyebabkan produk dalam daerah yang kalah bersaing dengan produk negara lain dan banyaknya produk-produk yang masuk secara illegal

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

Capaian Kinerja sasaran yang ditargetkan dalam RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan 2021 - 2026 seperti yang terlihat pada tabel 2.5 dibawa ini :



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Tabel 2.5

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUPUT)	SATUAN	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025			SUMBER DANA	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN		TARGET	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN		
1	2	3	4			5	6			7	8
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Unit Kerja Internal Yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	5,959,637,931.47		APBD II	100	5,959,637,931.47		APBD II	
1 Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Dokumen	8	46,300,000.00		APBD II	8	46,300,000.00		APBD II	
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	18,300,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	2	18,300,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	28,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	6	28,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	Unit Kerja	6	5,120,885,931.47		APBD II	6	5,120,885,931.47		APBD II	
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bula n	14	5,120,885,931.47	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	14	5,120,885,931.47	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	Unit Kerja	6	147,000,000.00		APBD II	6	147,000,000.00		APBD II	
	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	2	16,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	2	16,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	3	40,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	3	40,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	2	16,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	2	16,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	75,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	10	75,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan penyediaan Jasa Penunjang	Unit Kerja	6	575,452,000.00		APBD II	6	575,452,000.00		APBD II	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	2,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	4	2,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	35,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	12	35,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Di Sediakan	Laporan	12	538,452,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	12	538,452,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD	Unit Kerja	6	70,000,000.00		APBD II	6	70,000,000.00		APBD II	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	26	55,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	26	55,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	15	9,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	15	9,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	1	6,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	1	6,000,000.00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

II.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	13.66	34,953,747.43		APBD II	13.66	34,953,747.43		APBD II	
1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Perkoperasian	Koperasi	30	34,953,747.43		APBD II	30	34,953,747.43		APBD II	
	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	30	34,953,747.43	Kab. Nunukan	APBD II	30	34,953,747.43	Kab. Nunukan	APBD II	
III.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang di Lakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Persen	17.37	46,456,946.60		APBD II	17.37	46,456,946.60		APBD II	
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi	25	46,456,946.60		APBD II	25	46,456,946.60		APBD II	
	1. Pengawasas Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	46,456,946.60	Kabupaten Nunukan	APBD II	50	46,456,946.60	Kabupaten Nunukan	APBD II	
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Volume Usahanya	Persen	13.65	23,633,256.90		APBD II	13.65	23,633,256.90		APBD II	
1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi	55	23,633,256.90		APBD II	55	23,633,256.90		APBD II	
	1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Managemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif Bernilai Tambah Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, tandarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Unit Usaha	20	23,633,256.90	Kab. Nunukan	APBD II	20	23,633,256.90	Kab. Nunukan	APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	13.41	174,666,656.78		APBD II	13.41	174,666,656.78		APBD II	
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	UMK	80	174,666,656.78		APBD II	80	174,666,656.78		APBD II	
	1. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	80	74,666,656.78	Kab. Nunukan	APBD II	80	74,666,656.78	Kab. Nunukan	APBD II	
	2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	55	100,000,000.00	Kab. Nunukan	APBD II	55	100,000,000.00	Kab. Nunukan	APBD II	
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Ratio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	5.79	133,612,099.22		APBD II	5.79	133,612,099.22		APBD II	
1.	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pelaku Usaha Kecil	3	133,612,099.22		APBD II	3	133,612,099.22		APBD II	
	1. Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM Serta Desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	50	133,612,099.22	Kab. Nunukan	APBD II	50	133,612,099.22	Kab. Nunukan	APBD II	



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

VII.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Jumlah Sentra IKM	Persen	4.29	108,972,265.63		APBD II	4.29	108,972,265.63		APBD II	
1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	1	108,972,265.63		APBD II	1	108,972,265.63		APBD II	
	1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	N/A	-	Kabupaten Nunukan	APBD II	N/A	-	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	8	36,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	8	36,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	36,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	1	36,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	20	36,972,265.63	Kabupaten Nunukan	APBD II	20	36,972,265.63	Kabupaten Nunukan	APBD II	
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	40,000,000.00		APBD II	100	40,000,000.00		APBD II	
1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaku IKM	11	40,000,000.00		APBD II	11	40,000,000.00		APBD II	
	1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang usaha dengan risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	7	20,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	7	20,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7	20,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	7	20,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

IX.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan	Persen	2.40	15,000,000.00		APBD II	2.40	15,000,000.00		APBD II	
1.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Informasi Lengkap dan Terkinini	Dokumen	1	15,000,000.00		APBD II	1	15,000,000.00		APBD II	
	1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	15,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	1	15,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Layak / Sehat	Persen	23.26	378,195,000.00		APBD II	23.26	378,195,000.00		APBD II	
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	Unit	1	50,000,000.00		APBD II	1	50,000,000.00		APBD II	
	1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	100,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	1	100,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	2. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	50,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	1	50,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
2.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Orang	27	328,195,000.00		APBD II	27	328,195,000.00		APBD II	
	1. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	9	328,195,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	9	328,195,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	Persen	2.21	1,362,895,100.00		APBD II	2.21	1,362,895,100.00		APBD II	
1.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Diawasi	Jenis Barang	23	1,214,799,000.00		APBD II	23	1,214,799,000.00		APBD II	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Akseibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	8	30,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	8	30,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
2.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	8	1,184,799,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	8	1,184,799,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar	Jumlah pengendalian harga dan Stok barang kebutuhan pokok yang dilaksanakan	Kegiatan	15	131,096,100.00		APBD II	15	131,096,100.00		APBD II	
1.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	10	66,850,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	10	66,850,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
2.	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Laporan	5	64,246,100.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	5	64,246,100.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
3.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah	Jumlah pupuk Bersubsidi yang disalurkan yang diawasi	Ton	3000	17,000,000.00		APBD II	3000	17,000,000.00		APBD II	
1.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan pengawasan Penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	3	17,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	3	17,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

XII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkat Penjualannya	Persen	50.00	78,000,000.00		APBD II	50.00	78,000,000.00		APBD II	
1.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi / pemasaran	3	78,000,000.00		APBD II	3	78,000,000.00		APBD II	
1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	1	39,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	1	39,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
2.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kementrian Dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	2	39,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	2	39,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
XIII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Persen	56.68	158,000,000.00		APBD II	56.68	158,000,000.00		APBD II	
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan	Persen	56.68	158,000,000.00		APBD II	56.68	158,000,000.00		APBD II	
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	475	104,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	475	104,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
2.	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina	Orang	13	54,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	13	54,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	439,399,418,320.46	750,000,000.00		APBD II	439,399,418,320.46	750,000,000.00		APBD II	
1.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1	Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti	Jumlah Pameran/ misi dagang	3	750,000,000.00		APBD II	3	750,000,000.00		APBD II	
	1. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Yang Dibina	Pelaku Usaha	5	100,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	5	100,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	2. Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang	Pelaku Usaha	1	25,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	1	25,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	3. Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	1	100,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	1	100,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	4. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	5	450,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	5	450,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	5. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Yang Dibina	Pelaku Usaha	10	75,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	10	75,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
XV	ROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Fasilitasi (Non) Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Persen	100	100,000,000.00		APBD II	100	100,000,000.00		APBD II	
1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Yang Diterbitkan	Dokumen	2	50,000,000.00		APBD II	2	50,000,000.00		APBD II	
	1. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	2	50,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	2	50,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
2.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah SKA Yang Diterbitkan	Dokumen	100	50,000,000.00		APBD II	100	50,000,000.00		APBD II	
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	100	50,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	100	50,000,000.00	Kabupaten Nunukan	APBD II	



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan. Dalam urusan jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan Anggaran. Diakui pula sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia Usulan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.



Tabel 2.7

Daftar Usulan Hasil Musrembang Kecamatan dan berupa Pokok – pokok pikiran DPRD pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan

KEGIATAN/AKTIVITAS KECAMATAN YG DIUSULKAN		PRIORITAS	LOKASI DESA, RT	VOLUME	OPD PENANGGUNG JAWAB
A. PENGEMBANGAN EKONOMI YANG BERBASIS POTENSI DAERAH YANG BERKELANJUTAN (PERTANIAN, PERIKANAN, UMKM)					
KECAMATAN NUNUKAN					
1	Pengembangan Usaha Kerupuk Home Industri		Rt. 10 & 02 Kelurahan Nunukan Timur		Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
2	Pengembangan Usaha Bawang Goreng Home Industri		Rt. 16 Kelurahan Nunukan Timur		Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
KECAMATAN SEBATIK TENGAH					
1	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil		Desa Aji Kuning		Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
KECAMATAN KRAYAN					
1	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) (SUBSIDI ONGKOS ANGKUT)		Pa' Kebuan	1 Paket	Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan

NO	PENGUSUL	USULAN	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL	VOLUME	SATUAN
1	HENDRAWA N, S.Pd	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Desa Tanjung Hilir Kecamatan Lumbis, Kab. Nunukan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	Paket



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) selain didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah, juga mengacu pada rumusan tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

T.1. Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, UKM, IKM dan Perdagangan. Untuk menilai keberhasilan tujuan ini pada akhir periode Renstra, dapat diukur dengan indikator **% Pertumbuhan Koperasi Sehat, % Pertumbuhan UKM, % pertumbuhan IKM dan % Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan.** Agar tujuan ini dapat dicapai maka laju pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan harus selalu ditingkatkan secara signifikan.



Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dicapai oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Nunukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016-2022 Dinas Kopersi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

S.1. Meningkatnya Sektor Industri Kecil Menengah yang berdaya saing.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran 1 : % Wirausaha Baru IKM.

S.2. Meningkatnya jumlah koperasi Aktif.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran 1 : % Koperasi Aktif.

S.3. Meningkatnya jumlah UMK yang produktif.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :



**Indikator Sasaran 1 : % Pertumbuhan wirausaha baru
UMK.**

S.4. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Luar Negeri.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

**Indikator Sasaran 1 : % Pertumbuhan Nilai Ekspor Non
Migas.**

**S.5. Meningkatnya Kinerja Arus Distribusi Barang Dalam
Wilayah Kab. Nunukan.**

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator kinerja :

Indikator Sasaran 2 : % Standar Deviasi Harga

Adapun tujuan dan sasaran jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut :



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan**

TUJUAN PD		SASARAN PD		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN PD		DATA AWAL 2021		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
								2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir Kinerja
INDIKATOR TUJUAN													
1.	Meningkatnya Kinerja Sektor Koperasi, UKM,IKM dan Perdagangan		1.	Persentase Pertumbuhan Koperasi Sehat	25,00	40,00	42,86	50,00	53,33	56,52	56,52		
			2.	Persentase Pertumbuhan UMK	14,57	1,80	2,36	2,88	3,36	3,80	3,80		
			3.	Persentase Pertumbuhan IKM	3,33	1,55	2,28	2,98	3,61	4,19	4,19		
			4.	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-1,58	5,95	7,44	7,05	7,13	5,91	5,91		
INDIKATOR SASARAN													
		1.	Meningkatnya Kinerja Koperasi	1.	Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas	9,79	9,93	11,17	12,41	13,65	14,89	14,89	
		2.	Meningkatnya Jumlah UMK Yang Produktif	1.	Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru UMK	105,45	29,50	34,17	42,44	44,10	45,49	45,49	
		3.	Meningkatnya Sektor Industri Kecil Menengah Yang Berdaya Saing	1.	Persentase Wirausaha Baru IKM	16,18	16,74	17,47	18,37	19,42	20,61	20,61	
		4.	Meningkatnya Kinerja Ekspor Luar Negeri	1.	Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
		5.	Meningkatnya Kinerja Arus Distribusi Barang Dalam Wilayah Kab. Nunukan	1	Standar Deviasi Harga	7,55	7,22	6,67	6,44	6,11	5,56	5,56	



3.2 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan di Tahun 2025 dapat lihat pada table berikut :

Tabel 3.2
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Nunukan

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUPUT)
4		5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Unit Kerja Internal Yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Perencanaan , Penganggran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan
	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan
	4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan penyediaan Jasa Penunjang
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Di Sediakan
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara
	3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan
II.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase SDM Pengelola Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya



1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Perkoperasian
	1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasi
III.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang di Lakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1. Pengawas Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Volume Usahnya
1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif Bernilai Tambah Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, tandarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil



1.	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
	1. Fasilitas Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan
	2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Ratio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan
1.	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	1. Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM Serta Desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
VII.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan Jumlah Sentra IKM
1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri
	2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

	4.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan oleh instansi terkait
1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
	1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang usaha dengan risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri , Perizinan kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota
IX.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan
1.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Data InformasiLengkap dan Terkinni



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

	1.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Layak / Sehat
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola
	1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan
	2.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina
	1.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan
1.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Diawasi
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
	2.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah pengendalian harga dan Stok barang kebutuhan pokok yang dilaksanakan



DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN

	1.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	2.	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota
	3.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk Bersubsidi yang disalurkan yang diawasi
	1.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan pengawasan Penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%
XII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkatkan Penjualannya
	1.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
	2.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kementerian Dengan Retail, <i>Marketplace</i> , Perhotelan dan Jasa Akomodasi
XIII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Persentase UTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku
	1.	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan
	1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur , Alat Takar , Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	2.	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Ekspor Bersih Perdagangan
1.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti
	1.	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan Yang Dibina
	2.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang
	3.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal
	4.	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan
	5.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor Yang Dibina
XV	ROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Fasilitasi (Non) Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu
1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Yang Diterbitkan
	1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik
2.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah SKA Yang Diterbitkan
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah, serta Tujuan dan Sasaran pada RPJMD, maka untuk mencapai Sasaran dan Tujuan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan maka ditentukanlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 sebagai berikut :



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA TAHUN 2025

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUPUT)	SATUAN	RENCANA TAHUN 2025			SUMBER DANA	CATATAN PENTING
				TARGET	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI KEGIATAN		
1		2	3	4			5	8
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Persentase Unit Kerja Internal Yang Memperoleh Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	5.359.246.697,00		APBD II	
1	Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Dokumen	8	120.872.285,00		APBD II	
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	76.262.185,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Kordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	44.610.100,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	Unit Kerja	6	4.098.736.116,00		APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bulan	24/14	4.098.736.116,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal yang Mendapatkan Layanan Administrasi Umum	Unit Kerja	6	424.148.040,00		APBD II	
	1.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	3	109.419.000,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	5	75.445.040,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	28.171.000,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	211.113.000,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan penyediaan Jasa Penunjang	Unit Kerja	6	459.302.256,00		APBD II	
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4	5.000.000,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	42.000.000,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Di Sediakan	Laporan	12	412.302.256,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal Yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan BMD	Unit Kerja	6	256.188.000,00		APBD II	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	26	93.188.000,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	15	13.000.000,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	1	150.000.000,00	DKUKMPP Kab. Nunukan	APBD II	
II.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi Yang Meningkatkan Kapasitasnya	Persen	13,66	64.809.200,00		APBD II	
1.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi Yang Mengikuti Pelatihan Pemahaman Perkoperasian	Koperasi	30	64.809.200,00		APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan dan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	30	64.809.200,00	Kab. Nunukan	APBD II	
III.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang di Lakukan Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Persen	17,37	126.528.520,00		APBD II	
1.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Koperasi Yang Diperiksa dan Diawasi Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi	25	126.528.520,00		APBD II	
	1.	Pengawasas Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit Usaha	50	126.528.520,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		Persentase Koperasi Yang Meningkatkan Volume Usahanya	Persen	13,65	41.652.240,00		APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi Yang Diberdayakan dan Dilindungi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi	55	41.652.240,00		APBD II	
	1. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Unit Usaha Yang Produktif Bernilai Tambah Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, tandarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Unit Usaha	20	41.652.240,00	Kab. Nunukan	APBD II	
V.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persen	13,41	252.986.065,00		APBD II	
1.	Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan , Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro Yang Diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	UMK	80	252.986.065,00		APBD II	
	1. Fasilitasi Kemudahan Perijinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	80	109.996.665,00	Kab. Nunukan	APBD II	Pendataan
	2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	55	142.989.400,00	Kab. Nunukan	APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Ratio Usaha Mikro Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	5,79	116.528.520,00		APBD II	
1.	Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		Jumlah Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Pelaku Usaha Kecil	3	116.528.520,00		APBD II	
	1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM Serta Desain dan teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	50	116.528.520,00	Kab. Nunukan	APBD II	
VII.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Peningkatan Jumlah Sentra IKM	Persen	4,29	620.910.750,00		APBD II	
1.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota		Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	1	620.910.750,00		APBD II	
	1.	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	N/A	-	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	8	57.520.000,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	3.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1	-	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	4.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	20	563.390.750,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
VIII.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Persentase Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	123.700.760,00		APBD II	
1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Verifikasi Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaku IKM	11	123.700.760,00		APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka perluasan Usaha untuk Bidang usaha dengan risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	7	62.025.380,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7	61.675.380,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
IX.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase Data IKM Produktif di Kabupaten Nunukan	Persen	2,40	118.769.280,00		APBD II	
1.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Tersedianya Data Informasi Lengkap dan Terkinni	Dokumen	1	118.769.280,00		APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	1.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	118.769.280,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi Layak / Sehat	Persen	23,26	373.311.800,00		APBD II	
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	Unit	1	70.952.000,00		APBD II	
	1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1	70.952.000,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	2.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	1		Kabupaten Nunukan	APBD II	
2.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Orang	27	302.359.800,00		APBD II	
	1.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	9	302.359.800,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Sesuai Dengan Ketentuan Perundang - Undangan	Persen	2,21	1.585.448.600,00		APBD II	
1.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Diawasi	Jenis Barang	23	1.226.793.000,00		APBD II	
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	8	36.079.600,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	2.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan	8	1.190.713.400,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
2.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah pengendalian harga dan Stok barang kebutuhan pokok yang dilaksanakan	Kegiatan	15	308.728.600,00		APBD II	
	1.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha distribusi barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	10	78.569.200,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	2.	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1(satu) Kabupaten/Kota	Laporan	5	230.159.400,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
3.		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pupuk Bersubsidi yang disalurkan yang diawasi	Ton	3000	49.927.000,00		APBD II	
	1.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan pengawasan Penyaluran dan penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	3	49.927.000,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
XII		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Unggulan Daerah Yang Meningkat Penjualannya	Persen	50,00	91.576.165,00		APBD II	
1.		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah promosi / pemasaran	3	91.576.165,00		APBD II	
	1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM Yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	1	49.999.960,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
	2.	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kementrian Dengan Retail, <i>Marketplace</i> , Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	2	41.576.205,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
XIII		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	Persen	56,68	158.003.134,00		APBD II	



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

1.	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Ditera/Tera Ulang Dalam Tahun Berjalan	Persen	56,68	158.003.134,00		APBD II	
	1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur , Alat Takar , Alat Timbang , dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	475	104.001.734,00	Kabupaten Nunukan	APBD II
	2.	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Dibina	Orang	13	54.001.400,00	Kabupaten Nunukan	APBD II
XIV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	439.399.418.320,46	506.930.665,00		APBD II
1.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pameran Dagang dan Misi Dagang Yang Diikuti	Jumlah Pameran/ misi dagang	3	506.930.665,00		APBD II
	2.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi dalam Pameran dagang	Pelaku Usaha	1	229.997.460,00	Kabupaten Nunukan	APBD II
	3.	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	1	119.396.705,00	Kabupaten Nunukan	APBD II
	4.	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	5	115.618.500,00	Kabupaten Nunukan	APBD II



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN NUNUKAN**

	4.	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	5	41.918.000,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
XV	ROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Fasilitas (Non) Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Persen	100	99.913.855,00		APBD II	
1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Yang Diterbitkan	Dokumen	2	49.914.000,00		APBD II	
	1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	2	49.914.000,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
2.	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)		Jumlah SKA Yang Diterbitkan	Dokumen	100	49.999.855,00		APBD II	
	1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	100	49.999.855,00	Kabupaten Nunukan	APBD II	
Jumlah Total						9.640.316.251,00			



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja OPD) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Tahun 2025 ini disusun dalam rangka mewujudkan rencana yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2025 oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafond anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Penyusunan Renja OPD Tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.

Rencana Kerja ini sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan tahun 2025 dan diharapkan manfaat pelaksanaan kegiatan tersebut dapat membantu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Nunukan



serta sebagai penunjang pembangunan daerah Demikian untuk dilaksanakan.

Nunukan, April 2024

Kepala Dinas

Sabri, ST., M.Si

**Pembina Utama Muda IV/ C
NIP.19720109 200212 1 005**